

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Masita

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This reseach aims to describe the process of School Operational Grant Program Implementation at Senior High School of Parigi Moutong Regency. The method employed is descriptive qualitative research with technique of data collection covering observation, interview, and documentation. The research result indicates that the implementation of school operation grand program implementation at senior high school of parigi moutong regency with model not optimal yet. There are some factors influencing such as : 1). The high school of parigi moutong regency from aspect of budget operation and seccesfulness is not efficient, 2). The implemtation of school operational grand program implementaion at senior high school of parigi moutong regency from aspect of budget operation and successfulness is effective.

Keywords : *evalutio, efficiency, effectiveness and school operational grand program*

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada tanggal 25 Juli 2013. Salah satu tujuan PMU adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah.

Dalam pengantar Juknis BOS tahun 2014, disebutkan untuk mencapai tujuan PMU yang terjangkau dan bermutu, pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA). Pada Tahun 2014, telah disiapkan anggaran sebesar 4,3 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia. Tujuan program BOS SMA ini adalah membantu

sekolah untuk memenuhi biaya operasional non-personalia.

Di sampaikan pula bahwa BOS SMA adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dana BOS SMA digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA tersebut.

Sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Jumlah siswa dan besaran dana iuran sekolah serta biaya ekstrakurikuler siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi kebijakan (diskresi) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah.

Dalam konteks ini, pada prinsipnya Program BOS SMA dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat

khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang telah diterima.

Berkaitan dengan pelaksanaan program BOS SMA, sesuai data dari Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong tahun 2014, bahwa di Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai tahun 2013 yang diterima satu semester (Juli-Desember) sedangkan untuk tahun 2014 memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 28.457.976.000,00. Dana bantuan BOS diterima langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas baik negeri/swasta melalui nomor rekening Kepala Sekolah.

Sejak program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicanangkan pada tahun 2004, Sekolah Menengah Atas (SMA) belum pernah menerima dan mengelolah BOS, nanti di tahun 2012 baru di programkan. Hal ini diibaratkan sekolah ibarat menerima “durian runtuh” meskipun telah dilakukan sosialisasi tetap saja sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang selalu terlambat, serta adanya temuan bahwa pihak sekolah tidak membayar pajak sesuai ketentuan Juknis BOS.

Kelemahan lainnya, pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan, serta penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan

musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid/wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekurangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kredibilitas masih diragukan.

Bahwa permasalahan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Parigi Moutong, yakni secara konsep BOS diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu. Akan tetapi kenyataan praktek dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai seperti mereka tetap saja dalam memperoleh layanan pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan, contoh Iuran Komite. Tentunya masih banyak pungutan yang harus ditanggung siswa yang dilakukan oleh sekolah dengan berbagai alasan. Padahal keberadaan program BOS seharusnya dapat membantu bagi masyarakat tidak mampu yang seharusnya untuk mendapatkan bantuan (Observasi awal, 20 September 2014).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 08/127/RHS/INSPEKTORAT/XII/2014 Tanggal 2 Desember 2014 atas Program Bantuan Operasional (BOS) Tahun Anggaran 2013 dan 2014, terdapat temuan 1) Pengelolah program BOS Belum mengacu /

berdasarkan pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 2) Sekolah belum membuat / menyusun Rencana Kerja Jangkah Menengah (RKJM) 4 Tahunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam Bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan RAB BOS. 3) Sekolah belum melaksanakan administrasi pembukuan keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 456.000.000,-. 5) PPN/PPH yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 52.500,-. Dengan temuan tersebut, maka pada bulan April 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan surat tindak lanjut temuan inspektorat, yang intinya memerintahkan agar sekolah: 1) Mengelolah program BOS mengacu / berdasarkan pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 2) Segera membuat dan menyusun Rencana Kerja Jangkah Menengah (RKJM) 4 Tahunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam Bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan RAB BOS. 3) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Segera mempertanggungjawabkan Dana BOS yang telah dibelanjakan sebesar Rp.456.000.000,-. 6) Segera menyeter PPN/PPH sebesar Rp. 52.500,- ke kas Negara.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengkaji *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong* Yang menjadi pertanyaan dalam kajian ini adalah : “*Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong?*” Tujuannya mendeskripsikan untuk mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong , dan manfaat

praktis ; Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Parigi maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS tahun berikutnya. Sedang manfaat teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam merumuskan Kebijakan Publik pada organisasi publik;

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumberdaya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Pemilahan kedua dari tujuan kebijakan adalah regulatif *versus* deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif membebaskan.

Pemilahan ketiga adalah dinamisasi *versus* stabilisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumberdaya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Sifat kebijakan stabilisasi adalah mengerem dinamika yang terlampau cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi maupun sosial. Pemilahan keempat adalah kebijakan yang memperkuat negara *versus* memperkuat pasar.

Fermana (2009 ; 34) mengungkapkan, bahwa kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik. Hogwood dan Gunn (Suharto, 2008 ; 4) menyatakan bahwa : kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil – hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna “ kebijakan “ hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi – organisasi non pemerintah, dan lembaga – lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan – kebijakan pula. Eystone (Wahab

2012 ; 12) memaparkan definisi kebijakan publik : “ antara hubungan yang berlangsung diantara unit / satuan pemerintahan dengan lingkungannya”

Kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran negara, sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik atau mekanismen pasar daripada peran negara. Pada praktiknya, setiap kebijakan mengandung lebih dari satu tujuan kebijakan yang dikemukakan diatas, dengan kadar yang berlainan.

Heglo (Abidin 2012) menyebutkan kebijakan sebagai “ *a course of action intended to accomplish some end* “ (Sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencaai tujuan tertentu. Bertolak dari pengertian Heglo, Jones (Abidin 2012) merumuskan kebijakan sebagai perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum.

Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri atas dua nilai luhur, yaitu kebijakan harus cerdas, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya sehingga sebuah kebijakan harus disusun setelah meneliti data dan menyusunnya dengan cara-cara ilmiah, dan kebijakan haruslah bijaksana.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Rahkmat 2009) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (whatever government choose to do or not to do). Defenisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan kebijakan publik juga menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Segala keputusan yang diambil pemerintah adalah kebijakan, namun

tidak mengambil keputusan pun adalah suatu kebijakan.

Evaluasi Kebijakan

Wibawa dkk yang dikutip Nugroho (2008) mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006) “Evaluasi kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing”.

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam sebuah organisasi. Soemardi (1992) mengatakan “Penilaian (evaluation) dapat diberikan

pengertian/definisi sebagai suatu proses/rangkaian kegiatan pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan/produktivitas kerja yang telah tercapai dengan target yang direncanakan”.

Anderson (dalam Arikunto, 2004) memandang Evaluasi sebagai sebuah proses penentuan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Anderson juga menyampaikan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto, 2004), mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan pelbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan atau ketidakcocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan apabila semuanya berjalan baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi.

Cochran (2012:11) mengungkapkan tentang evaluasi yaitu *Policy evaluation thus involves collecting and analyzing information about the efficiency and effectiveness of policies* (Evaluasi kebijakan merupakan proses pelibatan, pengumpulan dan

menganalisa informasi tentang efisiensi dan efektivitas kebijakan).

Sehingga oleh Cochran memberikan dimensi dalam melakukan evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Efisiensi Kebijakan, untuk melihat Biaya aktif untuk tujuan utama.
2. Efektifitas Kebijakan, untuk melihat Sejauh mana tujuan mendasar dan kebutuhan sasaran / warga terpenuhi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun outcome kebijakan.

Program Bantuan Operasional Sekolah

Dalam Petunjuk Teknis Tahun 2013, Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah Univesal yang terjangkau dan bermutu. BOS SMA juga merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non- Personalia Sekolah. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana BOS, sekolah diwajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/provinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin. BOS SMA digunakan untuk membantu memenuhi biaya operasional non-personalia sekolah termasuk didalamnya pengadaan buku Kurikulum 2013. Adapun Besar dana BOS yang diterima sekolah

dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan.

Secara umum program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Sedangkan secara khusus bertujuan:

1. Membantu biaya operasional non personalia sekolah, termasuk pengadaan buku Kurikulum 2013.
2. Mengurangi angka putus sekolah SMA.
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA.
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin.
5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Untuk Sasaran program adalah SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I: 4.270.810 siswa;
- Tahap II: 4.497.242 siswa.

Dengan satuan biaya BOS SMA sebesar 1.000.000/siswa/tahun atau sebesar Rp 500.000/siswa/semester.

Dari segi pemanfaatan, dalam Juknis BOS SMA digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia sekolah yang meliputi:

- 1 Pengadaan buku kurikulum 2013;
- 2 Pengadaan buku teks pelajaran;
- 3 Pengadaan alat tulis sekolah;
- 4 Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran;
- 5 Pengadaan alat habis pakai;

- 6 Pengadaan bahan habis pakai;
- 7 Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler;
8. Pemeliharaan dan perbaikan rusak ringan sarana dan prasarana sekolah;
9. Langganan daya dan jasa lainnya;
10. Kegiatan penerimaan siswa baru;
11. Penyusunan dan Pelaporan;
12. Website, CCTV, software pembelajaran: membangun website sekolah dengan domain "sch.id", pengadaan CCTV untuk pengawasan pelaksanaan ujian nasional, dan software multimedia pembelajaran.
13. Entri data individual sekolah melalui aplikasi Dapodikmen

METODE

Menurut Sugiyono (2005) "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di lakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain". Silalahi (2009 ; 28) menyatakan bahwa penelitian Deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang suatu situasi, setting sosial, atau hubungan. Pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan & Taylor dalam Prastowo (2012;22) yang mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive dalam Penentuan Informan, yang terdiri dari : 1 orang Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong, 1 orang , Kepala SMA Negeri 1 Parigi, 1 orang, Kepala SMA Muhammadiyah Parigi, 1 orang Unsur Komite SMA Negeri 1 Parigi, 1 orang unsur Komite SMA Muhammadiyah Parigi . Sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang.

Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan ada 2 macam yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari

informan. Dan data sekunder yaitu merupakan data pendukung dari data primer yang digunakan untuk kepentingan analisis yang diperoleh dari SMA Negeri 1 Parigi dan SMA Muhammadiyah Parigi, serta Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, serta melalui penelusuran literatur perpustakaan dan dokumen-dokumen.

Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012; 91) dengan prosedur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Reduksi Data (pengurangan data). Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh kategori-kategori tematik. 2). Display data (penyajian data). Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. 3). Menarik kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dengan mengambil lokasi di 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Parigi, yang sesuai data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parigi dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah, maka penelitian ini berfokus pada 2 Sekolah tersebut. Sebagai sekolah unggulan di Kecamatan Parigi, SMA Negeri 1 Parigi saat ini telah mendapatkan Akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) melalui Surat Keputusan BAN pada tanggal 18 Oktober 2010. Sekolah yang beralamat di Jl. Pramuka No. 179 Parigi, pada tahun pelajaran 2014 / 2015 memiliki siswa

sebanyak 925 orang, yang terdiri dari 368 siswa laki – laki dan 557 siswa perempuan.

SMA Muhammadiyah Parigi merupakan Sekolah yang didirikan oleh Yayasan Muhammadiyah , dan merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas tertua yang ada di Kecamatan Parigi, yang mulai beroperasi sejak tahun ajaran 1982 / 1983, yang beralamat Jl. Tonikota No.99 Kelurahan Loji Kecamatan Parigi, dengan status sekolah di Akui / Terakreditasi B. Sejak berdiri, SMA Muhammadiyah Parigi berdiri diatas tanah milik sendiri / Yayasan, dengan luas tanah 2.240 m²

Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, peneliti telah melakukan wawancara mendalam terdiri dari 2 aspek, yaitu pertama : Efisiensi Kebijakan, untuk melihat biaya aktif untuk tujuan utama dan Efektifitas Kebijakan, untuk melihat sejauh mana tujuan mendasar dan kebutuhan sasaran / warga terpenuhi (Cochran 2012:11)

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dengan melihat 2 aspek evaluasi diatas, dengan melakukan wawancara melibatkan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan mengerti masalah – masalah yang diteliti.

Untuk mengetahui apakah Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sudah Efisien , dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan yang bernama Makruf yang merupakan Kepala Seksi Pembinaan SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong, yang mengemukakan bahwa :

“ Penggunaan Anggaran Dana BOS di SMAN 1 Parigi Kec. Parigi sudah tepat sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOS, penggunaannya meliputi : Pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan Membantu siswa miskin dalam bentuk : Pembebasan pembayaran sekolah berupa SPP sekolah, Meringankan pembayaran sekolah Pembiayaan peningkatan prestasi, dan pengembangan potensi dan bakat siswa (kegiatan ekstrakurikuler) (Wawancara,20 Februari 2015)“.

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA pada Kecamatan Parigi sudah tepat, sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS, yang penggunaannya pada pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan membantu siswa miskin. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Parigi sudah efisien, berhasil guna dalam peningkatan mutu pendidikan.

Mengenai keberhasilan program BOS, Andu Kaduku sebagai Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 1 Parigi , yang mengungkapkan bahwa :

“ Sebagian berhasil dan sebagian belum, karena dana bos tersebut masih terbatas penggunaannya masih untuk operasional sekolah sedangkan untuk honor guru belum bisa di gunakan dari dana BOS tersebut. .” (Wawancara, 20 Februari 2014).

Wawancara ini menggambarkan bahwa menurut Komite Sekolah pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Parigi belum berhasil, karena masih untuk operasional sekolah, sedangkan honor guru belum bisa digunakan dari dana BOS. Sehingga perlu didorong agar honor guru juga bisa diakomodir dalam pembiayaan dana BOS. Hal ini juga menjadi keluhan komite sekolah, karena honor guru mesti menarik dana dari orang tua siswa lagi.

Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sudah efektif, dapat dilihat bawah ini, yang dikutip dari pendapat informan dari Kepala SMA

Muhammadiyah Parigi yang bernama Abd. Rahman, yang menyebutkan bahwa :

“Dana bantuan operasional sekolah yang ada sekarang ini, bagi peserta didik sangat berguna, karena dengan adanya program BOS SMA, sekolah bias membebaskan siswa yang kesulitan biaya sekolah atau siswa yang berekonomi lemah. Bagi sekolah, dengan adanya program BOS SMA, dana BOS dapat menanggulangi sebagian dari biaya operasional sekolah.” (Wawancara, 20 Februari 2014)

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOS di SMA Muhammadiyah Parigi sudah berguna, karena dapat membebaskan siswa dari kesulitan biaya sekolah bagi siswa yang berekonomi lemah, dan bagi sekolah dapat menanggulangi sebagian dari biaya operasional sekolah. Hal ini juga menggambarkan bahwa dengan adanya program BOS, sekolah dapat melaksanakan pembelajaran dengan pembiayaan yang sudah tersedia, dan siswa – siswi mereka tidak mudah untuk putus sekolah sebagai akibat dari beban biaya pendidikan.

Mengenai manfaat Program BOS dalam mendukung wajib belajar 12 tahun, Haeruddin Masri sebagai Ketua Komite Sekolah SMA Muhammadiyah Parigi, yang mengungkapkan bahwa :

“ Program bantuan operasional sekolah SMA telah membantu anak – anak kami untuk bisa menyelesaikan pendidikan sampai menengah atas. Awalnya kami pesimis bisa terus menyekolahkan anak – anak kami ke jenjang pendidikan menengah ini. ” (Wawancara,20 Februari 2015)“.

Wawancara ini menunjukkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Muhammadiyah Parigi memberikan manfaat dalam mengentaskan wajib belajar 12 Tahun, yang awalnya dikuatirkan oleh orang tua murid akan keberlanjutan study anak – anak mereka. Hal ini juga menggambarkan bahwa program BOS telah mendorong semangat orang tua siswa untuk optimis

menyekolah anak – anak mereka sampai ke jenjang pendidikan menengah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Belum Efisien, karena dari aspek yang dikaji, yaitu :

- Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Parigi dari aspek Penggunaan Anggaran dan Keberhasilan belum efisien.
- Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas Se – Kecamatan Parigi dari aspek Kegunaan sudah efektif.

Oleh karena itu penelitian ini menyarankan untuk diperhatikan yaitu saran teoritis 1) Perlunya penelitian lanjutan tentang program bantuan operasional sekolah Sekolah Menengah Atas yang jangkauannya lebih besar dari sekedar Kecamatan Parigi. 2) Perlunya kajian yang lebih mendalam tentang indikator – indikator evaluasi kebijakan yang lebih banyak dalam menghasilkan penelitian yang lebih luas. Sedangkan secara praktis : perlunya pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah untuk mengalokasikan dana dari Anggaran Daerah untuk menanggulangi kekurangan dana yang masih ada di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing yaitu Prof. Dr. Sultan, M, Si dan Dr. Muh. Nawawi, M, Si atas segala bimbingan, koreksi dan motivasinya sehingga bisa menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Chohran, Clarke E, et.al. 2012. *American Public Policy: An Introduction, Tenth Edition*. Wadsworth. USA.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Filosofis*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta.
- Silalahi. Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Rafika Aditama. Bandung.
- Soemardi. 1992. *Pengantar Administrasi Pemerintahan*. STKS. Bandung
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung.
- Sugioyon. 2010, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alpha Betha. Bandung.
- Wahab, S.A. 2012. *Analisis Kebijakan ; dari Formulasi Ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta